

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari sekian pajak yang dibebankan kepada masyarakat, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, karena dibebankan kepada penanggung pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kelebihan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang merupakan hasil reformasi perpajakan Tahun 1983 dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951 yaitu:

1. Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan Tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru terdapat mekanisme pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda (*cascade effect*).
2. Sistem tarif yang sederhana. Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951 terdapat 9 (Sembilan) jenis tarif sedangkan sejak Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 hanya mengenal 1 (satu) jenis tarif sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasannya.
3. Menciptakan persaingan yang sehat, karena atas impor dikenakan pajak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas produksi dalam negeri pada tingkat harga yang sama, sementara untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan

memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Menurut pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang artinya ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut telah memungut pajak dari orang pribadi/badan yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. PKP sendiri wajib melaporkan faktur pajak yang telah dibuat ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di wilayah yang telah ditentukan. Dari sekian banyak Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Jawa Timur salah satunya adalah KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan merupakan unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangny sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan faktur pajak dinilai kurang efektif karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena besarnya beban administrasi yang ditanggung DJP (Kompas.com, 05/11/2014). Mengenai Faktur Pajak fiktif, dalam periode tahun 2008-2013. jumlah kasus Faktur Pajak fiktif yang ditangani Kantor Pusat DJP mencapai 100 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,05 triliun (Beritasatu.com, 16/01/2014).

Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tersebut pemerintah mulai meluncurkan suatu sistem baru yaitu aplikasi E-Faktur. E-Faktur merupakan faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-Faktur pertama kali diterapkan pada tahap pertama pada tanggal 1 Juli 2014 kepada 100 PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar, Kantor Wilayah (Kanwil) Khusus, dan KPP Madya di wilayah DKI Jakarta. Kemudian pada tahap kedua akan berlangsung mulai 1 Juli 2015 di seluruh wilayah Jawa dan Bali, karena hampir seluruh PKP terdaftar di Pulau Jawa dan Bali, lalu pada tahap selanjutnya semua faktur pajak sudah berbentuk elektronik menyeluruh pada 1 Juli 2016. Tujuan diadakannya sistem E-Faktur ini adalah agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik dari segi kualitas maupun waktu dalam pembuatan dan/atau penerbitan Faktur Pajak sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, alasan peneliti melakukan obyek penelitian tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem aplikasi terbaru yakni Faktur Pajak Elektronik (E- Faktur). Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN”**

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat secara fungsional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Sistem Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Selain terdapat tujuan studi lapang, laporan ini juga terdapat manfaat yang bisa diberikan untuk beberapa pihak terkait.

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan.

2. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seberapa besar Pengaruh Implementasi Sistem eFaktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan serta untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi pembelajaran para pembaca atau penelitian selanjutnya yang ada kaitannya mengenai Pengaruh Implementasi Sistem Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang Pengaruh Implementasi Sistem Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam

memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang bersangkutan dengan penelitian.
2. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang narasumber. Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten seperti bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan guna mendapatkan informasi tentang implementasi *e-faktur* PPN.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji ulang data, dokumen, buku, jurnal serta makalah yang bersangkutan dengan penelitian, sehingga diperoleh manfaat sebagai dasar pengujian data sekaligus langkah-langkah dalam menganalisa data.